

**UPAYA DEWAN ARKTIK DALAM MENANGANI KONFLIK
LINGKUNGAN DI WILAYAH ARKTIK**

SKRIPSI

Oleh:

IRVAN MAHENDRA

2110852020



Dosen Pembimbing:

- 1. Apriwan, S.Sos., MA, PhD**
- 2. Rifki Dermawan S.Hum., M.Sc**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas Dewan Arktik (*Arctic Council*) dalam menangani konflik lingkungan dan sumber daya alam non-tradisional di wilayah Arktik di tengah perubahan iklim yang masif (amplifikasi Arktik) dan ketegangan geopolitik. Sebagai forum antarpemerintah yang beroperasi tanpa kewenangan hukum yang mengikat (*soft law*), Dewan Arktik merepresentasikan paradoks tata kelola institusi yang secara formal lemah namun memiliki pengaruh kebijakan yang luas. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengaplikasikan teori Tata Kelola Lingkungan Regional (*Regional Environmental Governance*) dan Komunitas Epistemik (*Epistemic Communities*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Dewan Arktik terletak pada kemampuannya memobilisasi Kelompok Kerja (seperti AMAP dan PAME) sebagai komunitas epistemik. Komunitas ini menghasilkan pengetahuan ilmiah yang kredibel, valid, dan salien, serta mengintegrasikan Pengetahuan Adat (*Indigenous Knowledge*), yang berfungsi sebagai katalisator perubahan kebijakan (*institutional spillover*). Bukti keberhasilan ini terlihat dari kontribusi Dewan terhadap pembentukan rezim hukum mengikat (*hard law*) seperti Konvensi Stockholm, Konvensi Minamata, dan *Polar Code*. Namun demikian, kerentanan model tata kelola ini terungkap ketika dihadapkan pada geopolitik keras (*hard politics*), seperti invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 yang melumpuhkan kerja sama formal dan menciptakan "Celah Rusia" dalam data iklim global. Kesimpulannya, kinerja Dewan Arktik sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik negara-negara anggotanya.

Kata Kunci: Dewan Arktik, Tata Kelola Lingkungan Regional, Komunitas Epistemik, Konflik Lingkungan, Hukum Lunak.



ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the Arctic Council in addressing non-traditional environmental and natural resource conflicts in the Arctic region amidst massive climate change (Arctic amplification) and geopolitical tensions. As an intergovernmental forum operating without legally binding authority (soft law), the Arctic Council represents a governance paradox of a structurally weak institution that nonetheless wields extensive policy influence. Employing a qualitative case study methodology, this research applies the theories of Regional Environmental Governance (REG) and Epistemic Communities. The findings indicate that the Council's success lies in its ability to mobilize its Working Groups (such as AMAP and PAME) as epistemic communities. These communities produce credible, legitimate, and salient scientific knowledge, integrating Indigenous Knowledge, which serves as a catalyst for policy change (institutional spillover). Evidence of this success is seen in the Council's contributions to the formation of binding legal regimes (hard law) such as the Stockholm Convention, Minamata Convention, and the IMO Polar Code. Nevertheless, the vulnerability of this governance model is exposed when confronted with hard politics, as demonstrated by the 2022 Russian invasion of Ukraine, which paralyzed formal cooperation and created a "Russia Gap" in global climate data. In conclusion, the performance of the Arctic Council is significantly influenced by the political stability of its member states.

Keywords: *Arctic Council, Regional Environmental Governance, Epistemic Communities, Environmental Conflict, Soft Law*

